

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A. (2014). *Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Edisi Kelima belas Jilid I*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Audit: Pengertian, Jenis, dan Tahapan Pelaksanaannya*. (t.thn.). Diambil kembali dari Jurnal Enterpreneur: <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengetahui-pengertian-audit-jenis-dan-tahapan-pelaksanaannya/#:~:text=Apa%20itu%20audit%3F,tidak%20memihak%20yang%20disebut%20auditor>.
- Bappeda Jabar. (2010, Desember 24). *RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015*. Diambil kembali dari Bappeda Jabar: <http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rpjmd-kabupaten-indramayu-tahun-2011-2015/>
- Direktorat Jenderal Pajak . (2012). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak . (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan .

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 23/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2020 tentang Penggunaan Aplikasi Desktop Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pelaksanaan Tugas dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja Dari Kantor (Work From Office) Dan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Direkto.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak .

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2020 tentang Persyaratan Perjalanan Bagi Pegawai Dan Tindak Lanjut Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Kenormalan Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomro SE-33/PJ/2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.). *KPP Pratama Indramayu*. Diambil kembali dari DJP: <https://www.pajak.go.id/id/kpp-pratama-indramayu>

Irsutami, Irianto, D., Ikhlah H, M., & Riadi, S. (2020). Project Based Learning - Audit Kepatuhan. *Journal Of Applied Managerial Accounting*.

Kementerian Keuangan . (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak .

Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013.

Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan . (2015, April 23). *Bukti Audit Dalam Pemeriksaan Pajak Versus Bukti Audit Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Diambil kembali dari bppk.kemenkeu: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-bukti-audit-dalam-pemeriksaan-pajak-versus-bukti-audit-dalam-pemeriksaan-laporan-keuangan-2019-11-05-83a8ef86/>

Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2014, Desember 10). *Bukti Audit Kompeten Dalam Pemeriksaan Pajak dan Pembuktian Dalam Sengketa Pajak*. Diambil kembali dari bppk.kemenkeu:

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-bukti-audit-kompeten-dalam-pemeriksaan-pajak-dan-pembuktian-dalam-sengketa-pajak-2019-11-05-157cde20/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (t.thn.). *DAFTAR KECAMATAN*.

Diambil kembali dari Data Refrensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/wilkec.php?kode=021800>

*Kepatuhan Wajib Pajak*. (t.thn.). Diambil kembali dari Hestanto:

<https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

Komunitas Perpajakan Indonesia. (2021, Desember 2). *Kenali Ruang Lingkup,*

*Jenis, dan Kriteria Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan Pajak*. Diambil kembali dari Ortax: <https://ortax.org/kenali-ruang-lingkup-jenis-dan-kriteria-pemeriksaan-pengujian-kepatuhan-pajak>

Lindia R, A., Siti A, E., & Saifi, M. (t.thn.). Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan

Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak. Diambil kembali dari Jurnal Mahasiswa Perpajakan.

Mulyadi. (2014). *Auditing Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

Mustakim P, A. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka

Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Skripsi*, 82.

Nadia. (2019). Analisis Efektifitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota. *Skripsi*, 98.

Negara Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Negara Republik Indonesia. (t.thn.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Negara Republik Indonesia. (t.thn.). Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Prof.Dr.Apollo. (2021, April 8). *Pemeriksaan Pajak*. Diambil kembali dari Kompasiana:

[https://www.kompasiana.com/novitaariandy2056/606ef84f8ede4825ae003aa2/tb-1-prof-dr-apollo-pemeriksaan-pajak?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/novitaariandy2056/606ef84f8ede4825ae003aa2/tb-1-prof-dr-apollo-pemeriksaan-pajak?page=1&page_images=1)

Wikipedia. (2022, Februari 13). *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu*. Diambil kembali dari Wikipedia:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Indramayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indramayu)